

Implementasi Kebijakan Pemekaran di Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso

Moh Rusli Syuaib^{a,1}, Abd Khalid Hs. Pandipa^{b,2*}

^a ¹Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sintang Maroso

¹mohruslisyaib@gmail.com, ²khalidpandipa@gmail.com

*korespondensi penulis ²khalidpandipa@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 03-03-2022

Disetujui: 26-03-2022

Kata Kunci:

Implementasi,
pemekaran

ABSTRAK

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan pemekaran kecamatan di kecamatan poso kota selatan Kabupaten poso dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan emekaran kecamatan di kecamatan poso kota selatan Kabupaten poso Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni menganalisis tentang Implementasi Kebijakan emekaran kecamatan di kecamatan poso kota selatan Kabupaten dan teknik wawancara untuk mengetahui Implementasi Kebijakan emekaran kecamatan di kecamatan poso kota selatan Kabupaten poso Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan pemekaran kecamatan Poso Kota Selatan sudah terlaksana dengan baik, kenyataan ini dapat dilihat dari pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sudah mengarah pada pelayanan publik seperti yang menjadi tujuan utama pemekaran suatu daerah yakni untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan *good governance* di kecamatan Poso Kota Selatan dapat dilihat responsif, efisiensi dan akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari kemampuan aparat kecamatan dalam menanggapi dan merespon pelaksanaan tugas pemerintahan, produktifitas kerja aparat, kualitas layanan bagi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pemekaran kecamatan Poso Kota Selatan di Kabupaten Poso dilaksanakan menggunakan prinsip-prinsip teori yang di kemukakan Edward III yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan di Kecamatan Poso Kota Selatan yaitu Dalam hal pelayanan yang berhubungan dengan biaya, perlu adanya standar biaya yang digunakan dalam pengurusan administrasi sehingga masyarakat memiliki persiapan yang sesuai kebutuhan.

Abstract: The purpose of the study was to analyze the implementation of the sub-district expansion policy in the poso sub-district, southern city of poso district and to find out the factors that became obstacles in the implementation of the sub-district expansion policy in the poso sub-district, southern city of poso district. The research method used was descriptive qualitative, namely analyzing the implementation of the expansion policy. Based on the discussion of the research results, it can be concluded that the implementation of the expansion policy for the Poso Selatan sub-district has been implemented well, this fact can be seen from the services provided. The activities carried out by government officials have led to public services as the main goal of the expansion of an area, namely to bring services closer to the community. The implementation of good governance in Poso Kota Selatan sub-district can be seen as responsive, efficiency and accountability have been carried out well, this can be seen from the ability of sub-district officials to respond and respond to the implementation of government duties, work productivity of the apparatus, quality of service for the needs and interests of the community. The expansion of the Poso sub-district, South City in Poso Regency was carried out using the theoretical principles put forward by Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. There are several factors that influence the improvement of services in the Poso District, South City, namely in terms of services related to costs, it is necessary to have a standard fee used in administrative management so that the community has the appropriate preparations.



PENDAHULUAN

Kebijakan publik yang telah diadopsi dan dilegitimasi oleh pemerintah dan lembaga legislatif, sudah semestinya diimplementasikan melalui sistim administrasi publiknya, tak terkecuali melalui kebijakan

desentralisasi. Keputusan-keputusan seringkali tidak dibuat dilapangan dan segala petunjuk pelaksanaan (juklak) serta petunjuk teknis (juknis) selalu berasal dari kantor-kantor pusat departemen atau kementerian. Administrator dilapangan hanya menerima sedikit tanggungjawab mengenai apa yang harus mereka kerjakan. Kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diimplementasikan dalam sistim administrasi publik baik ditingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dengan diberikannya otonomi pada daerah, pemerintah daerah bisa meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal inilah yang menjadi dasar dan obsesi pemerintah pusat untuk menyerahkan kewenangannya kepada daerah. Hanya persoalannya mampu dan siapkah daerah untuk melaksanakannya, semuanya perpulang pada kesiapan daerah masing-masing dalam menyikapi dan bertindak untuk melaksanakan otonomi daerah ini dengan sebaik-baiknya.

Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso adalah Kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan induk yakni Kecamatan Poso Kota dengan harapan mampu memberi pelayanan yang baik seperti yang diisyaratkan melalui konsep *good governance* (pemerintahan yang baik). Kecamatan pemekaran ini terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan yakni : yaitu Bukit Bambu, Kawua, Lembomawo, Ranononcu, dan Sayo. Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa tujuan pemekaran ialah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, makanya penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut karena fenomena yang ada bahwa pemekaran yang dilakukan sudah jauh menyimpang dari tujuan sebenarnya yakni sarat dengan kepentingan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kepentingan yang lain sehingga pada gilirannya tidak membawa dampak positif kepada masyarakat. Melalui kebijakan pemekaran diharapkan jangkauan pelayanan lebih optimal, mempersingkat jalur birokrasi sehingga mempermudah masyarakat untuk menikmati pelayanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Kualitatif, yakni Implementasi Kebijakan pemekaran kecamatan di kecamatan poso kota selatan Kabupaten poso dan faktor faktor Implementasi Kebijakan emekaran kecamatan di kecamatan poso kota selatan Kabupaten poso

Lokasi penelitian adalah kantor Kecamatan Poso Kota Selatan Adapun Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada Poso Kota Selatan 7 Orang). Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan pemekaran kecamatan di kecamatan poso kota dan faktor-faktor yang mengambat Implementasi Kebijakan pemekaran kecamatan di kecamatan poso kota maka pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada masyarakat

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan analisis model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2011:334) dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

- Reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pokoknya.
- Penyajian data. Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan organisasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lainnya.
- Verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Verifikasi data dimulai sejak permulaan pengumpulan data sampai ditemukan bukti baru maka kesimpulan awal tersebut tidak berubah. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan sudah kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan pemekaran kecamatan poso kota selatan Kabupaten poso

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah, dan hubungannya dengan pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah mengenai urusan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam pelayanan publik.

Untuk mewujudkan masalah tersebut dikeluarkan Peraturan daerah Kabupaten Poso No 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Poso Kota Selatan. Tujuan utama pemekaran kecamatan adalah dalam rangka efektifitas pelayanan publik guna mewujudkan suatu pemerintahan yang baik yakni pemerintahan yang transparan dan terpercaya sehingga tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera. Implementasi kebijakan otonomi daerah diarahkan untuk menciptakan kemandirian pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya secara optimal dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian peningkatan kemampuan daerah untuk melakukan terobosan dan perubahan yang kreatif, inovatif, efektif dan efisien dalam rangka pemanfaatan semua potensi daerah masing-masing. Disamping itu pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pejabat dan aparatur daerah yang menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia yang handal sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan secara cepat sehingga mampu membuat inovasi demi untuk pelayanan kepada masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III membagi empat komponen yang sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan, yakni:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Dalam hubungannya dengan pemekaran kecamatan Banawa Tengah di Kabupaten Donggala beberapa komponen telah membangun komunikasi dengan baik kepada semua pihak sebelum pemekaran dilaksanakan dan begitu pula hubungannya dengan pelayanan publik setelah daerah ini mekar. Wawancara dengan salah satu masyarakat Hasan, pada tanggal 19 Februari 2022 mengatakan bahwa: Sebelum ada upaya untuk mekar dari kecamatan Poso Kota Selatan pasti beberapa tokoh masyarakat yang ada sudah mensosialisasikan kepada warga masyarakat adanya keinginan untuk membentuk kecamatan baru dan terlepas dari kecamatan Poso Kota sebagai kecamatan induk.

Menurut Agustino (2006:157); "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik".

Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar. Berdasarkan hasil penelitian tentang implemetasi kebijakan pemekaran kecamatan Poso Kota Selatan bahwa: "Pengaruh dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), struktur birokrasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja aparat kecamatan baik secara parsial (terpisah sendiri-sendiri) maupun secara simultan. Namun demikian, ditemukan hambatan komunikasi dimana terdapat disiplin rendah dan pemahaman tugas serta tanggung jawab yang kurang dari petugas pelaksana kebijakan". Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia sangat penting dalam implementasi kebijakan. Sehubungan dengan pemekaran kecamatan Poso Kota Selatan, berdasarkan hasil penelitian bahwa Kecamatan Poso Kota Selatan memiliki sumber daya manusia yang baik untuk menjadi sebuah kecamatan. Hasil wawancara dengan bapak Haerun, SE pada tanggal 21 Februari 2022 mengatakan bahwa : “Kecamatan Poso Kota Selatan memiliki sumber daya manusia yang handal untuk mekar sebagai sebuah kecamatan, karena di daerah ini banyak sarjana yang mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai yang diharapkan untuk mekarnya suatu daerah dan sebagian besar aparat kecamatan adalah eks pegawai pada kecamatan induk yakni kecamatan Poso Kota.

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: “*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People*”. Sementara Hodge (1996:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: “*Human resources, Material resources, Financial resources and Information resources*”. Pengelompokkan ini diturunkan pada pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: “*Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc*”. Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: “*Material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc*. Sumberdaya finansial digolongkan menjadi: “*Financial resources- cash on hand, debt financing, owner’s investment, sale reveue, etc*”. Serta sumber daya informasi dibagi menjadi: “*Data resources-historical, projective, cost, revenue, manpower data etc*”.

Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi”. (Tachjan, 2006:135)

c. Disposisi

Untuk mengetahui hal tersebut, akan ditampilkan penilaian informan yakni Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso, penempatan aparat sesuai dengan bidangnya hal dapat dibuktikan dengan adanya pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai yang diinginkan. Hasil wawancara dengan Hasan pada tanggal 23 Februari 2022 mengatakan bahwa : Apabila ada masyarakat berurusan dengan aparat kecamatan dalam hal pengurusan surat keterrangan Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain akan dilayani dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu”.

Untuk mengetahui hal tersebut, akan ditampilkan penilaian informan yaitu Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di kecamatan Poso Kota Selatan sudah sesuai standar yang diinginkan oleh masyarakat dalam hubungan dengan pemerintahan yang baik. Menurut Edward III dalam Wianarno (2005:142-143) mengemukakan “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Begitu pula halnya dengan pemekaran kecamatan Poso Kota Selatan struktur birokrasi sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam rangka melaksanakan sebuah kebijakan. Wawancara dengan Bapak Ferengki Tompira (camat Poso Kota Selatan mengatakan bahwa : Camat Poso Kota Selatan , sebelum mengambil suatu tindakan atau membuat suatu keputusan selalu berdiskusi dan meminta pendapat dari stafnya, dengan harapan bahwa keputusan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik karena dianggap sebagai keputusan bersama”. sehingga setiap aparat dapat bekerja sesuai dengan porsinya .

Wawancara dengan Rahmad Usman, S.Sos (Lurah Sayo) mengatakan bahwa : “ saya melihat bahwa Pak Camat Poso Kota Selatan sudah membagi tugas dengan baik sesuai kewenangan yang diberikan pada seksi-seksi untuk menangani tugas tertentu dan diharapkan setiap tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan dilaporkan hasilnya kepada kepada camat sesuai terget atau waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama”.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi”. *Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

”SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi”.

Faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan pemekaran kecamatan poso kota selatan Kabupaten poso yaitu

Pelaksanaan *good governance* di kecamatan Poso Kota Selatan dapat dilihat responsif, efisiensi dan akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari kemampuan aparat kecamatan dalam menanggapi dan merespon pelaksanaan tugas pemerintahan, produktifitas kerja aparat, kualitas layanan bagi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Implementasi kebijakan pemekaran kecamatan Poso Kota Selatan sudah terlaksana dengan baik, kenyataan ini dapat dilihat dari

pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sudah mengarah pada pelayanan publik seperti yang menjadi tujuan utama pemekaran suatu daerah yakni untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan *good governance* di kecamatan Poso Kota Selatan dapat dilihat responsif, efisiensi dan akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari kemampuan aparat kecamatan dalam menanggapi dan merespon pelaksanaan tugas pemerintahan, produktifitas kerja aparat, kualitas layanan bagi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Rozali, 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan kepala Daerah Secara Langsung*: Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Alwasilah Chaidar, 2008, *Pokoknya Menulis* : Jakarta, Kiblat.
- Bottomore TB, 2006, *Elite dan Masyarakat*, Jakarta, Akbar Tanjung Institute.
- Danim Sudarwan, 2005, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Dunn William, N 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*: Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R, Dalam Wijanarko, 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta, Bumi Aksara
- Ferry Anggoro Suryokusumo, 2008, *Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan*, Yogyakarta, Sinergi Publishing.
- Islami, Irpan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bina Aksara
- Khairul Muluk, 2005, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah* : Malang, Bayumedia.
- Keban Yeremias, 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*: Yogyakarta, Gava Media.
- Nugroho Riant, 2009, *Public Policy*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Osborne David, 2005, *Mewirusaha Birokrasi*, Jakarta, Victory Jaya Abadi.
- Oentarto dkk, 2004, *Format Otonomi Daerah Masa Depan*, Jakarta, Samitra Media Utama.
- Rahmat , 2009, *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*, Jakarta, Pustaka Arif.
- Salusu, J, 1996, *Pengambilan Keputusan Stratejik* : Jakarta, Gramedia.
- Suherli, 2008, *Menulis Karangan Ilmiah* : Jakarta, Arya Duta.
- Samodra Wibawa, 2009, *Administrasi Negara, Isu-isu Kontemporer*: Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Sugiono , 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Siagian Sondang, 2008, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Thoha Miftah, 2008, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta, Media Grafika.
- Thoha Miftah, 1998, *Deregulasi Birokrasi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka LP3ES
- Widjaya HAW, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Widjaya HAW, 2003, *Titik Berat Otonomi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Widjaya HAW, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Widjaya HAW, 2008, *Otonomi Desa*, Jakarta, Rajawali Press.

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Poso No. 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Poso Kota Selatan.